

**KOMUNKASI PEMERINTAHAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023 DI DESA LENDANG ARA KECAMATAN
KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Lalu Artha Dinata Alvin
NPP. 31.0744

*Asdaf Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: alvingasendra@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Heru Rochmansjah S.H, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Lack of communication between the Village Government and the Village Consultative Body (BPD) in preparing the 2023 village government work plan in Lendang Ara village has resulted in complaints from the community about the construction of irrigation canals because they are seen as not paying attention to the community's priority scale.

Purpose: To find out government communication in preparing the 2023 village government work plan in Lendang Ara village and what factors hinder government communication in preparing the 2023 village government work plan in Lendang Ara village. **Methods:** This research uses a descriptive qualitative method then the technical sample used is Purposive Sampling. Results: Government communication in preparing the 2023 village government work plan in Lendang Ara village uses the Malayu Hasibuan concept, namely in the field of partnership it has gone well, but in the field of coordination and consultation it has not run optimally. This is because the BPD is less active in carrying out its duties and functions.

Conclusion: Government communication in preparing the 2023 village government work plan in Lendang Ara village in the partnership sector has gone well, with the determination of the village government's work plan running according to schedule and without obstacles. However, in the field of consultation and coordination, progress was not optimal because in village development planning deliberations the BPD was less active so that communication tended to be one way only and in its implementation village deliberations were not carried out by the BPD but rather carried out by the village government. The factors that hinder government communication are communication patterns, BPD's lack of understanding of its functions and the public's lack of understanding of BPD's functions. In order to improve government communication in preparing Village government work plans in Lendang Ara village, it is recommended that capacity building of the BPD is needed by implementing training and conducting outreach to the community about the duties of the BPD and the role that the community has in village development.

Keywords : Government Communication, Village Government, BPD

ABSTRAK

Permasalahan(GAP): Komunikasi yang kurang antara Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023 di desa Lendang Ara menyebabkan pembangunan saluran irigasi di keluhkan masyarakat karena di anggap tidak memerhatikan skala prioritas masyarakat. **Tujuan:** Untuk mengetahui komunikasi pemerintahan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023 di desa Lendang Ara serta factor apa yang menghambat komunikasi pemerintahan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023 di desa Lendang Ara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif kemudian teknis sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. **Hasil/Temuan:** Komunikasi pemerintahan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023 di desa Lendang Ara dengan menggunakan konsep Malayu Hasibuan yaitu pada bidang kemitraan sudah berjalan baik, akan tetapi pada bidang koordinasi dan konsultasi belum berjalan optimal. Hal ini di karenakan BPD kurang aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. **Kesimpulan:** Komunikasi pemerintahan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023 di desa Lendang Ara pada bidang kemitraan sudah berjalan baik, dengan penetapan rencana kerja pemerintah desa berjalan sesuai jadwal dan tanpa hambatan. Akan tetapi dalam bidang konsultasi dan koordinasi berjalan belum optimal dikarenakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa BPD kurang aktif sehingga komunikasi yang berjalan cenderung satu arah saja serta pada pelaksanaannya musyawarah desa tidak di laksanakan BPD melainkan di laksanakan oleh pemerintah desa. Adapun factor yang menghambat komunikasi pemerintahan yaitu pola komunikasi, BPD kurang memahami fungsi serta kurang pahamnya masyarakat terhadap fungsi BPD. Guna meningkatkan komunikasi pemerintahan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah Desa di desa Lendang Ara, disarankan di perlukan peningkatan kapasitas dari BPD dengan dilaksanakannya Diklat serta di adakannya sosialisasi ke masyarakat tentang tugas BPD dan peran yang dimiliki masyarakat dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: Komunikasi Pemerintahan, Pemerintah Desa, BPD

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran penting dalam suatu pembangunan termasuk pembangunan yang ada di desa. Menurut Simamora (2006:67), mengemukakan bahwa pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Sedangkan menurut Sahroni (2004:59), bahwa pembangunan adalah proses sistemik paling tidak terdiri atas tiga unsur: Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konversi; Kedua, adanya proses konversi, yaitu wahana untuk "mengolah" bahan masukan; Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konversi yang dilaksanakan.

Desa sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah negara kecil yang memiliki wilayah, kekuasaan, pemerintahan, institusi lokal, penduduk, rakyat, warga, masyarakat, tanah dan sumber daya ekonomi (Eko,2015). Kepala desa sebagai pimpinan dalam pemerintah desa memiliki kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang pada dasarnya merupakan pusat atau yang menjalankan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain pemerintah desa, terdapat sebuah badan yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang kedudukannya sama dengan pemerintah desa dan memiliki tugas hampir sama dengan pemerintah desa. Menurut hasil penelitian Dirgantara Dani Putra, terdapat 3 bentuk komunikasi antara pemerintah desa dan BPD, yaitu hubungan dominasi, hubungan subkoordinasi dan hubungan kemitraan (Putra, 2009). Jenis hubungan kemitraan inilah yang di harapkan terjadi di setiap pembangunan yang ada di desa.

Pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan yang ada di desa harus memperhatikan hubungan kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan harus memperhatikan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan mitranya (Evi Zahara,2018). Komunikasi menjadi bagian yang penting untuk menunjang keberhasilan perencanaan pembangunanyang ada di desa. Aspirasi yang di tampung oleh BPD tidak akan mampu di salurkan dengan baik jika tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan BPD (Aunur Rafiq,2020). Menurut Ndraha (dalam Huraerah, 2011:110) partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, serta tahap evaluasi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat serta elemen pemerintahan desa merupakan hal penting dilakukan termasuk dalam proses penyusunan RKP Desa. Sejalan dengan ini, Yohanes mengatakan tolak ukur dari keberhasilan pemerintahan desa dalam pembangunan dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan desa (Yohanes, 2018).

Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintah desa juga telah mengamanatkan agar pembangunan desa di laksanakan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Di desa Lendang Ara, masyarakat menganggap hubungan pemerintah desa dan BPD kurang baik sehingga berdampak pada pembangunan desa. Hal ini di buktikan dengan beberapa pembangunan yang kurang di sukai masyarakat di karenakan pembangunan yang dilaksanakan kurang memerhatikan skala prioritas. Dalam hal ini pembangunan yang di maksud yaitu

pembangunan saluran irigasi.

Berdasarkan informasi awal, permasalahan yang terjadi di Desa Lendang Ara disebabkan kurangnya keterlibatan BPD dalam penyusunan RKP Desa. Padahal BPD sendiri memiliki tugas yang penting dalam menentukan arah pembangunan desa. Kurangnya keterlibatan BPD dalam penyusunan RKPDes menandakan bahwa terdapat hubungan yang tidak baik. Komunikasi yang kurang menjadi awal dari persoalan ini.

Secara umum kita bisa melihat bahwa kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dan BPD akan mengganggu jalannya Pemerintahan Desa. Hal ini terlihat jelas pada penyusunan RKP Desa tahun 2023 dimana output dari perencanaan tersebut masih di keluhkan masyarakat. Oleh karena itu persoalan ini memerlukan perhatian yang serius.

Berpedoman pada Permendagri No 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, komunikasi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam penyusunan RKP Desa harusnya bukan menjadi kendala yang berarti, akan tetapi pada kenyataannya di desa Lendang Ara persoalan ini mengganggu proses penyusunan RKP Desa. Oleh karena itu di butuhkan model komunikasi yang tepat antara Pemerintah Desa dan BPD dalam penyusunan RKP Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Komunikasi Pemerintahan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 Di Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Akibat Badan Permusyawaratan Desa kurang aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyebabkan pembangunan yang di laksanakan di desa Lendang Ara dianggap masyarakat tidak memperhatikan skala prioritas. Kurang aktifnya BPD membuat komunikasi yang terjalin antara BPD dan Pemerintah Desa terganggu sehingga menyebabkan pembangunan desa di persoalkan masyarakat.

Kurang aktifnya BPD di dalam komunikasi yang berlangsung dalam rangka perencanaan pembangunan di dominasi oleh satu pihak saja yaitu Pemerintah Desa. Tidak heran dominasi yang muncul ini menyebabkan suatu persoalan dimana di desa Lendang Ara dapat terlihat dari pembangunan saluran irigasi yang di persoalkan masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis dalam karya ilmiah sebagai bahan perbandingan serta sekaligus menjadi pedoman penulis. Penelitian Muhammad Saidil berjudul *Komunikasi Politik Badan*

permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone (Muhammad Saidil, 2019), menemukan bahwa komunikasi politik pada dimensi kemitraan yaitu kepala desa dan BPD membahas dan menyepakati peraturan desa, kepala desa menyerahkan LPPD kepada BPD, Kepala desa mengajukan RAPBDes, Kepala desa bersama sama menyusun RKP desa. Bentuk konsultasi kepala desa dan BPD yaitu pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, kegiatan atau peringatan hari keagamaan/hari besar nasional, mengadakan musyawarah desa, melaksanakan musyawarah pembangunan desa. Bentuk koordinasi antara BPD dan pemerintah desa bisa di lihat dalam pelaksanaan program yang ada di desa baik berupa program dari pemerintah atau program yang telah disusun dalam RKPDes. Penelitian Afrizal Pahlevi Lubis berjudul *Strategi Komunikasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan* (Afrizal Pahlevi Lubis, 2018), menemukan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi kerumah rumah masyarakat Desa untuk memberikan informasi seputar pembangunan desa, melaksanakan musyawarah desa, melibatkan masyarakat dalam penyusunan RKPDes, dan melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Selain itu cara pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa yaitu dengan cara selalu melibatkan masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa, selalu menerima aspirasi masyarakat dan selalu mengajak masyarakat untuk melihat hasil pembangunan desa yang telah di susun. Penelitian Zardiawan berjudul *Komunikasi Pemerintah Desa Dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Muara Kecamatan Tonra Kabupaten Bone* (Zardiawan, 2015), mengungkapkan bahwa komunikasi horizontal yang dilakukan dalam pembangunan pedesaan mencakup 1) perencanaan pembangunan infrastruktur dimana komunikasinya pada penyusunan RKPDes agar dapat dapat mencapai sasaran yang diinginkan, 2) pelaksanaan dalam tahap pembangunan infrastruktur pedesaan pada komunikasi pemerintah desa dan BPD yang dilaksanakan berdasarkan hasil Musrembang, 3) pengawasan pada pembangunan infrastruktur pedesaan dimana pemerintah desa dan BPD selalu bersinergi dalam melakukan pengawasan pembangunan. Penelitian Yoakim Antonius Mali, Nikolas Uskono dan Wilfridus Taus berjudul *Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa* (Yoakim dkk, 2019), menemukan bahwa sesuai dengan RKPDes desa manumutin silole tahun 2018, pemerintah desa telah menyusun dan menetapkan berbagai program melalui Perdes manumutin silole No. 02 Tahun 2018. Proses penyusunan RKPDes sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku yakni adanya koordinasi vertical (kepala desa dan perangkat)

maupun koordinasi Horizontal (kepala desa dan BPD). Penelitian Rudiadi, Abdiana Ilosa dan Saipul Al Sukri berjudul *Optimalisasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa* (Rudiadi dkk, 2021), menemukan bahwa kinerja dari pemerintah pemerintah skaladi dalam penyusunan RKP Desa selama ini belum terlaksana dengan baik. Hal itu terjadi karena masih kurangnya kerja sama antar organisasi pemerintah desa.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penulisan yang di lakukan yaitu komunikasi pemerintahan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa. penelitian yang di lakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baru.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi pemerintahan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023 di desa Lendang Ara kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah serta factor penghambat komunikasi pemerintahan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023 di desa Lendang Ara kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah.

II METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif memiliki sifat yang fleksibel atau dapat dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya (Simangunsong, 2016). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis komunikasi pemerintahan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023 di desa Lendang Ara kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah menggunakan pendapat dari Malayu Hasibuan yang menyatakan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan BPD apabila tiga unsur yaitu kemitraan, konsultatif, dan koordinatif sudah terlaksana dengan benar. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Kemitraan

3.1.1 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa

Kemitraan artinya pihak yang satu dengan pihak lainnya memiliki hubungan untuk melangsungkan kerjasama yang kuat untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa, Pemerintah Desa dan BPD merupakan mitra untuk terwujudnya pemerintahan yang baik serta terwujudnya pembangunan yang di harapkan masyarakat. Dalam membangun kemitraan yang kuat, di perlukan beberapa persyaratan meliputi persamaan perhatian, adanya kepercayaan antara satu dengan lainnya, dan yang terpenting harus saling memahami visi, misi, tujuan dan nilai yang hendak di capai bersama. Kemitraan lahir karena ada dua pihak yang bermitra. Pola kemitraan antara pemerintah desa dan BPD dalam penyusunan RKP desa di desa Lendang Ara dapat dilihat dari penetapan RKP Desa. Penetapan RKP desa ini akan menghasilkan sebuah regulasi berupa Peraturan Desa (Perdes).

Didalam pembuatan Perdes harus memerhatikan komunikasi yang terjalin di antara Pemerintah Desa dan BPD sehingga dapat menghasilkan suatu Perdes yang penerepannya cepat di laksanakan. Pembuatan Perdes memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak agar peraturan tersebut dapat di sahkan. Hal ini berlaku juga pada Perdes yang mengatur tentang RKP Desa. Komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan BPD di desa Lendang Ara dalam penetapan RKPDes berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari penetapan Perdes RKPDes yang berjalan sesuai jadwal dan tanpa adanya hambatan. BPD menyadari bahwa Perdes RKPDes telah di bahas pada Musrembang tingkat desa sehingga hasil dari Musrembang tersebut cukup untuk membuat Pemerintah Desa dan BPD segera mengesahkan Perdes RKP Desa tahun 2023.

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMD desa. RKP desa di tunjukkan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa baik berupa pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Oleh karena itu tidak heran apabila di dalam

perjalannya terjadi perubahan yang disebabkan berbagai factor. Hal ini berlaku juga di desa Lendang Ara, dimana RKP yang telah di tetapkan diharuskan untuk di rubah agar dapat menyesuaikan dengan anggaran saat itu. Perubahan yang terjadi ini perlu di tetapkan kembali menjadi Perdes agar memiliki landasan hukum yang kuat. Penetapan perubahan RKPDes desa Lendang Ara tahun 2023 berjalan dengan lancar sehingga dapat membuktikan hubungan komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan BPD dalam penetapan RKPDes.

3.2 Konsultatif

3.2.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam penyusunan RKPDes, bentuk konsultasi dapat dilihat dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembang). Konsultasi yang di lakukan Pemerintah Desa dan BPD ketika penyusunan RKPDes ialah konsultasi program-program untuk desa.

Musrembangdes di ikuti oleh berbagai pihak yaitu pemerintah desa, BPD, tokoh adat, tokoh agama, tokoh desa, tokoh pemuda, dan tokoh desa. Pada musyawarah tui di berikan kebebasan kepada pihak-pihak yang di undang untuk menyampaikan masukan atau sanggahan terkait dengan perencanaan pembangunan desa.

Musyawarah pembangunan desa pada dasarnya akan membahas dan menyepakati hasil kerja dari tim penyusunan RKPDes yang telah di bentuk oleh pemerintah desa. Perencanaan yang di buat oleh tim ini merupakan hasil pencermatan dari pagu indikatif desa dan penyelarasan program kegiatan masuk desa serta pencermatan dari dokumen RPJMDes.

Pembangunan saluran irigasi yang menjadi persoalan di masyarakat turut di bahas dalam Musrembang desa Lendang Ara. Mulai dari lokasi pembangunan hingga panjang pembangunan irigasi telah di sampaikan kepada para undangan yang mengikuti Musrembang. Pada musyawarah itu BPD Lendang Ara menyetujui rencana pambangunan saluran irigasi yang telah di rencanakan tim penyusun RKPDes. BPD memiliki keyakinan bahwa pemerintah desa telah merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BPD sebagai pengawas pemerintah desa dan lembaga yang menyerap aspirasi masyarakat harusnya memperhatikan dulu aspirasi masyarakat setelah itu baru memberikan dukungan kepada rencana yang tertuang pada RKPDes sehingga akan terwujud *check and balance*. Akan tetapi dilapangan, BPD terkesan menyetujui saja segala rencana yang telah di buat pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi yang berlangsung dalam Musrembang, dimana terjadi komunikasi satu arah saja yaitu dari pemerintah desa.

3.3 Koordinatif

3.3.1 Pelaksanaan Penyusunan RKPDes

Koordinasi terjadi dalam setiap kegiatan yang ada di pemerintahan desa termasuk dalam hal ini penyusunan RKPDes. Pemerintah desa dan BPD melakukan koordinasi demi terwujudnya RKPDes yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di desa Lendang Ara sendiri, koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan RKPDes di mulai dari tahap pertama hingga tahap akhir penyusunan RKPDes.

Musyawarah Desa (Musdes) merupakan tahap pertama dalam rangkaian pelaksanaan penyusunan RKPDes. Musdes di selenggarakan oleh BPD dan hasil Musdes ini akan menjadi pedoman penyusunan RKPDes oleh tim penyusun RKPDes. Musdes di Desa Lendang Ara di laksanakan oleh Pemerintah Desa. BPD mengkoordinasikan agar pelaksanaan Musdes di lakukan oleh Pemerintah desa. Koordinasi yang di lakukan oleh BPD pada dasarnya bagus, akan tetapi BPD selaku yang memiliki tugas tersebut tidak mendampingi pelaksanaan Musdes. Tidak terlibatnya BPD dalam pelaksanaan Musdes di desa Lendang Ara menyebabkan BPD tidak mengetahui aspirasi dari masyarakatnya. Musdes yang seharusnya menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada BPD, pada kenyataannya tidak terjadi. Maka tidak heran apabila BPD terlalu menyetujui segala program yang di buat oleh pemerintah desa tanpa memperhatikan aspirasi yang ada di masyarakat sehingga menimbulkan kesan BPD kurang aktif dalam penyusunan RKPDes

Tidak aktifnya BPD dalam penyusunan RKPDes tahun 2023 menyebabkan munculnya perdebatan di masyarakat atas pembangunan yang telah dilaksanakan yaitu pembangunan saluran irigasi. Masyarakat desa Lendang Ara keberatan dengan lokasi yang di pilih oleh Pemerintah Desa untuk pembuatan saluran irigasi. Masyarakat menganggap pembangunan ini kurang tepat dan condong hanya dinikmati beberapa orang saja.

Persoalan ini seharusnya tidak terjadi apabila BPD desa Lendang Ara aktif seperti pemerintah desanya. Akan tetapi dilapangan, BPD sebagai lembaga yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan baik. BPD tidak melaksanakan Musdes yang merupakan wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat sehingga BPD terkesan hanya mengikuti rencana pemerintah desa saja.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Muhammad Saidil yang dilakukan tahun 2019 dengan judul Komunikasi Politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Adapun persamaan

dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya yakni terletak pada pembahasan komunikasi dalam berlangsungnya pemerintahan desa serta subjek dan teori yang digunakan sama. Adapun perbedaan terletak pada isi penelitian, Muhammad Saidil meneliti tentang penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan penelitian ini membahas lebih dalam lagi yaitu tentang penyusunan RKPDes.

Afrizal Fahlevi Lubis yang dilakukan tahun 2018 dengan judul Strategi komunikasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Adapun Persamaan terletak pada pembahasan komunikasi pemerintahan desa dalam pembangunan dan metode yang digunakan sama. Perbedaan terletak pada apa yang diteliti, penelitian Afrizal Fahlevi Lubis meneliti tentang strategi komunikasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sedangkan penelitian ini membahas tentang komunikasi pemerintahan dalam penyusunan RKPDes.

Zardiawan yang dilakukan tahun 2015 dengan judul Komunikasi Pemerintah desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan DI Desa Muara Kecamatan Tonra Kabupaten Bone. Adapun persamaan terletak pada komunikasi pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan infrastruktur pedesaan. Perbedaan terletak pada apa yang diteliti, Zardiawan meneliti tentang komunikasi pemerintah desa dan BPD dalam mengelola pembangunan infrastktur pedesaan sedangkan penelitian ini membahas tentang komunikasi pemerintahan dalam penyusunan RKPDes.

Yoakim Antonius Mali, Nikolas Uskono dan wilfridus Taus yang dilakukan tahun 2019 dengan judul Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Adapun persamaan terletak pada pembahasan penyusunan RKPDes. Perbedaan terletak pada apa yang diteliti, Yoakim Antonius Mali DKK meneliti tentang koordinasi pemerintah desa dalam penyusunan RKPDes sedangkan penelitian ini meneliti tentang komunikasi pemerintahan dalam penyusunan RKPDes.

Rudiadi, Abdiana Ilosa dan saipul Al sukri yang dilakukan tahun 2021 dengan judul Optimalisasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa. Adapun persamaan terletak pada pembahasan penyusunan RKPDes. Perbedaan terletak pada apa yang diteliti, Rudiadi dkk meneliti tentang optimalisasi kinerja pemerintah desa dalam penyusunan RKPDes sedangkan penelitian ini meneliti tentang komunikasi pemerintahan dalam penyusunan RKPDes.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis penulis yang di paparkan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai komunikasi pemerintahan dalam penyusunan RKPDes di desa lendang ara tahun 2023 sebagai berikut:

1. Bentuk komunikasi pemerintahan dalam penyusunan RKPDes berbentuk kemitraan dapat di lihat dari penetapan RKPDes menjadi sebuah regulasi berbentuk Perdes dimana kemitraan yang terjalin berjalan dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari penetapan RKPDes menjadi Perdes yang cepat dan tanpa hambatan. Komunikasi pemerintahan dalam penyusunan RKPDes berbentuk konsultasi dapat di lihat dari proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa dimana musyawarah yang terjalin berjalan kurang baik. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya BPD dalam musyawarah sehingga menyebabkan asumsi pemerintah lebih dominan aktif. Selanjutnya bentuk komunikasi dalam penyusunan RKPDes berbentuk koordinasi dapat di lihat dari proses pelaksanaan penyusunan RKPDes dimana koordinasi yang berjalan cukup baik akan tetapi kurang optimal. Hal ini terlihat dari koordinasi yang terjadi antara pemerintah desa dan BPD agar pemerintah desa yang melaksanakan Musdes sehingga semua berjalan lancar akan tetapi kurang optimal karena BPD lepas tangan begitu saja.
2. Factor yang mempengaruhi komunikasi pemerintahan dalam penyusunan RKPDes di desa lendang ara tahun 2023 yaitu factor pendukung dari komunikasi pemerintahan adalah masyarakat dan juga terciptanya pola hubungan kerjasama pemerintah desa yang harmonis. Sedangkan factor penghambat yaitu pola komunikasi, tidak memahami fungsi dan masyarakat kurang memahami fungsi dari BPD.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa memperluas ruang lingkupnya yaitu tentang RPJMDes.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan sebesar besarnya kepada pemerintah desa dan BPD desa Lendang Ara kecamatan kopang beserta jajarannya, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Mali, Yoakim, Nikolas U, & Wilfridus Taus. 2019. Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah desa. *Jurnal Administrasi negara, Volume 1, Nomor 1, April 2019, Halaman 56-72.*
- Eko Sutoro. 2015. *Regulasi baru, Desa Baru ide, Misi dan semangat UU Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.* Jakarta: Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, daerah Transmigrasi Republik Indonesia.
- Fahlevi Lubisa, Afrizal, 2018. *Strategi Komunikasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.* (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Huraerah, Abu. 2008, *Pengorganisasian, Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat,* Humaniora: Bandung
- Malayu, S.P. Hasibuan. 2014. *Manajemen Dasar, pengertian, dan Masalah.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Putra, Dirgantara Dani. 2009. *Hubungan Dan Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* (Skripsi Sarjana, Universitas Sebelas Maret).
- Rafiq, Aunur. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6, No. 2 / 2020.* Karimun: Universitas Karimun
- Rudiadi, Abdiana Ilosa & Saipul Al Sukri. 2021 *Optimalisasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa. Jurnal El-Riyash Volume 12 Nomor 1 tahun 2021.*
- Sahroni, dkk. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah.* GTZ-USAID, Jakarta.
- Saidil, Muhammad. 2019. *Komunikasi Politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattriwalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.* (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Makasar)
- Simamora, 2006. *Perencanaan Pembangunan,* Sinar harapan, Jakarta.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metode Penelitian Pemerintahan.* Bandung: Alfabeta.
- Yohanes, M. (2018). Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Kulon Progo Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Zahara, Evi. 2018. Peranan Komunikasi Dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Warta Edisi: 55, Medan: Universitas Dharmawangsa.*
- Zardiawan, 2015. *Komunikasi Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Desa Muara Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.* (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Makassar).